



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DJKN

LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

Laporan Kinerja 2022

Jalan T. Hamzah Bendahara, Lhokseumawe 24315
Telepon (0645) 631600 / Faksimile (0645) 631234
Surel: kpknlhokseumawe@gmail.com



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT, KPKNL Lhokseumawe sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dibuat untuk mengukur kinerja KPKNL Lhokseumawe selama tahun anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lhokseumawe mencapai 114,09% pada tahun 2022. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tersebut terdiri dari *Stakeholder Perspective* 25%, *Customer Perspective* 15%, *Internal Process Perspective* 30%, dan *Learning & Growth Perspective* 30%. Capaian tersebut merupakan kontribusi dan kerja keras seluruh pegawai dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Lhokseumawe.

Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Lhokseumawe. Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, kami berharap laporan ini dapat berguna sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja yang telah dicapai sekaligus indikator guna meningkatkan kinerja lebih baik di masa yang akan datang.

Lhokseumawe, 01 Februari 2023

Kepala Kantor,



Bono Yudianto

NIP 19730310 199903 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe ini disusun sebagai bagian dari perwujudan praktek *good governance*. Perwujudan tersebut merupakan asas akuntabilitas di KPKNL Lhokseumawe bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai laporan pencapaian pelaksanaan program/Rencana Kerja Tahun 2022, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kanwil DJKN Aceh dan diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pada tahun anggaran 2022, dari 11 sasaran strategis dengan 22 Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2022, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan hasil sebesar 114,09% untuk Capaian Nilai Kinerja Organisasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran ini KPKNL Lhokseumawe yang pada tahun 2022 mendapatkan alokasi dana DIPA sebesar Rp 1.976.224.000 dan dapat kami realisasikan di luar belanja pegawai sebesar Rp 1.930.841.295 atau 98%.

Berdasarkan pada *Strategy Map Kemenkeu-Three* KPKNL Lhokseumawe tahun 2020, terdapat 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan KPKNL Lhokseumawe yang penjabarannya dari masing-masing perspektif dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot IKU 25% tercapai sebesar 30%;
2. *Customer Perspective* dengan bobot IKU 15% tercapai sebesar 15,94%;
3. *Internal Process Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai 33,45%;
4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai 34,70%;

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh. Tugas KPKNL Lhokseumawe sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe dipimpin oleh seorang Kepala, dengan susunan organisasi :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Pelayanan Lelang;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal;
- h. Jabatan Fungsional Pelelang.

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe meliputi wilayah Kabupaten/Kota :

- a. Kab. Aceh Utara;
- b. Kab. Aceh Tengah;
- c. Kab. Aceh Timur;
- d. Kab. Aceh Tenggara
- e. Kab. Aceh Tamiang;
- f. Kab. Bireun;
- g. Kab. Bener Meriah;
- h. Kab. Gayo Lues;
- i. Kota Lhokseumawe;
- j. Kota Langsa.



Gambar 1.1 Wilayah Kerja KPKNL Lhokseumawe

Sasaran-sasaran strategis organisasi yang dimiliki oleh KPKNL Lhokseumawe meliputi:

- 1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
- 2) Pelayanan publik yang prima;
- 3) Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara;
- 4) Manajemen pelayanan yang berkualitas;
- 5) Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel;

- 6) Tata kelola piutang negara dan lelang yang akuntabel;
- 7) Edukasi yang efektif;
- 8) Pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif;
- 9) Sumber Daya Manusia yang kompeten
- 10) Organisasi yang fit for purpose;
- 11) Sistem manajemen informasi yang andal;
- 12) Pengelolaan anggaran yang berkualitas.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Lhokseumawe pada tahun 2022 didukung oleh 24 orang pegawai dengan posisi sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor : 1 orang
- b. Kepala Sub Bagian Umum : 1 orang dan 5 orang staf
- c. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara : 1 orang dan 3 orang staf
- d. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian : 1 orang
- e. Kepala Seksi Piutang Negara : 1 orang dan 2 orang staf
- f. Kepala Seksi Pelayanan Lelang : 1 orang staf
- g. Kepala Seksi Hukum dan Informasi : 1 orang dan 2 orang staf
- h. Kepala Seksi Kepatuhan Internal : 1 orang dan 1 orang staf
- i. Fungsional Pelelang : 1 orang
- j. Fungsional Penilai : 2 orang

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Pelaksana	-	8	5	-	13
2.	Fungsional Pelelang	-	-	2	-	2
3	Fungsional Penilai Pemerintah	-	-	3	-	3
4.	Eselon IV	-	-	3	2	5
5.	Eselon III	-	-		1	1
	Jumlah		8	13	3	24

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe
Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SMA/MAN/SMEA/KPAA	-	-	1	-	1
2	Diploma I	-	1	-	-	1
3	Diploma III	-	8	-	-	8
4	Diploma IV / Strata 1	-	-	9	-	9
5	Strata 2	-		-	5	5
	Jumlah	0	9	10	5	24

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe
Berdasarkan Gender

No.	Gender	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Laki-laki	-	4	12	3	19
2.	Perempuan	-	4	1	-	5
	Jumlah	-	8	13	3	24

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe
Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

No.	Kelompok Umur	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	18 – 30 tahun	-	8	2	-	10
2.	31 – 40 tahun	-	-	8	-	8
3.	41 – 50 tahun	-	-	3	3	6
4.	Di atas 50 tahun	-	-	-	-	0
	Jumlah	-	8	13	3	24

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Lhokseumawe merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis KPKNL Lhokseumawe disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Sesuai konsep rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, visi DJKN yaitu : **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**.

Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai pedoman dan landasan kerja. Oleh karena itu, untuk merealisasikan visi yang ditetapkan maka KPKNL Lhokseumawe memiliki misi yang terdiri dari:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah kekayaan Negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

Dalam menjalankan seluruh visi dan misi diatas, senantiasa harus dijalankan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi akuntabilitas, *rule of law* dan transparansi, serta didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan kekayaan negara.

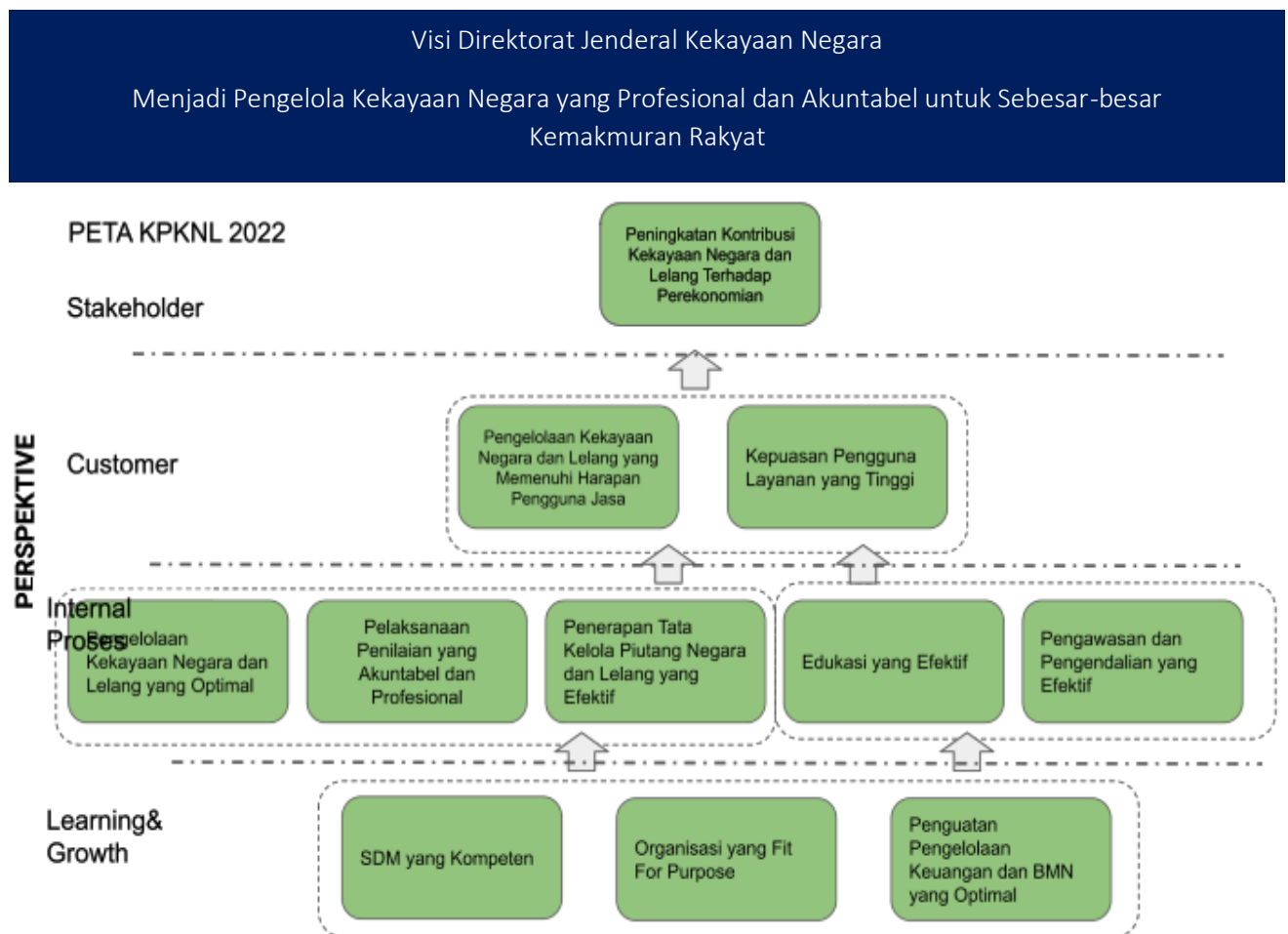
Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Lhokseumawe untuk periode 2020-2024 yaitu:

- Pengelolaan kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberikan manfaat finansial dan sosial;
- Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Peta Strategi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe



Gambar 2.1 Peta Strategi KPKNL Lhokseumawe

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Lhokseumawe harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Lhokseumawe. Sasaran Strategis KPKNL Lhokseumawe Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2022 yang terlihat pada Gambar 2.1. Peta Strategis Kemenkeu *Three* Tahun 2020 memuat 11 Sasaran Strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Lhokseumawe Tahun 2022

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1b-CP Persentase produktivitas lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
	2b-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,6	4,6 (skala 5)
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	65%	65%	65%
	4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
	4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

No	SS, IKU		Target					
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	92 (Skala 100)
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%
9	SDM yang Kompeten							
	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA ACEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,6 (skala 5)
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92 (Skala 100)
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan pengelolaan kekayaan Negara	85%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10.	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80 (Skala 100)
		10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (Skala 100)
11.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

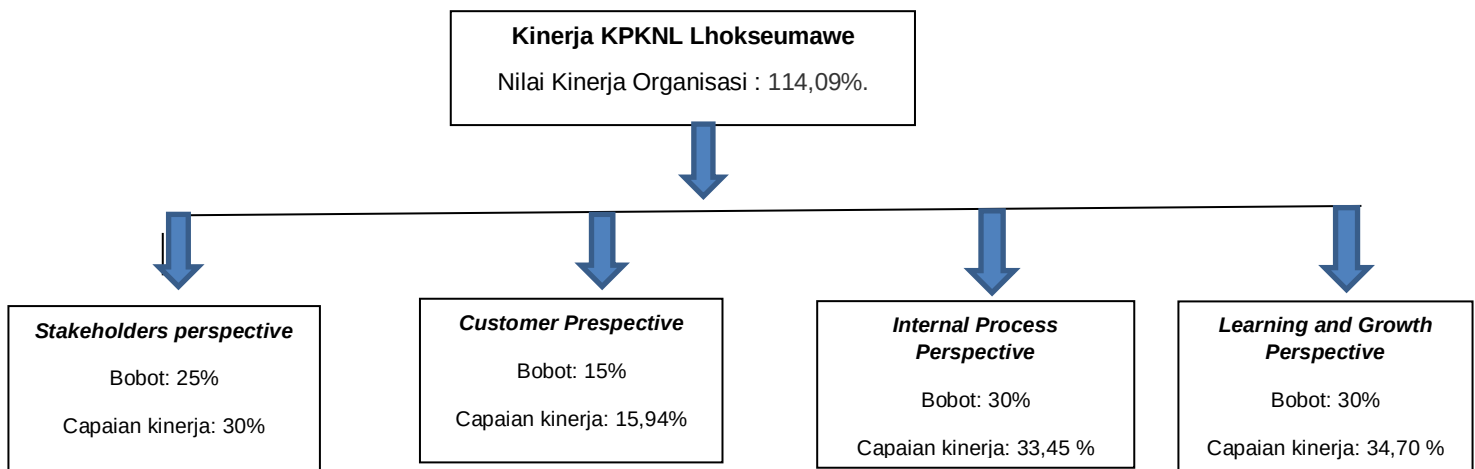
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lhokseumawe adalah sebesar 114,09%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Capaian Kinerja Masing-Masing Perspektif



Selama tahun 2022, dari 22 IKU KPKNL Lhokseumawe, secara keseluruhan 21 IKU berstatus hijau atau tercapai, 1 IKU berstatus kuning. Perbandingan jumlah IKU berdasarkan indeks capaian tertuang dalam Grafik 3.2 berikut.

Atas tugas dan fungsi KPKNL Lhokseumawe pada tahun 2022 yang telah dilaksanakan secara optimal dengan memperoleh hasil yang memuaskan dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2022

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket
	Stakeholder Perspective(25%)							30,00%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							120,00%	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	100%	124,39%	14%	50%	124,39%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	36%	46,55%	14%	50%	129,31%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							15,94%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							104,89%	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	100%	83,92%	14%	36%	83,92%	83,92%	kuning
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	100%	182,83%	14%	36%	182,83%	120,00%	hijau
2c-N	Indeks Rata-Rata Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	P/H	89	100	11%	28%	112,36%	112,36%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							107,69%	

3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,55	4,90	21%	100%	107,69%	107,69%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33,45%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							113,41%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/M	65%	100%	14%	24%	154,15%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	111,47%	19%	33%	111,47%	111,47%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	125,71%	14%	24%	125,71%	120,00%	hijau
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	100,00%	11%	19%	100,00%	100,00%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	19%	1,20%	14%	100%	193,68%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,35%	
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92%	100,00%	14%	50%	108,70%	108,70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	10%	6,24%	14%	50%	137,60%	120,00%	hijau
7	Edukasi yang Efektif							103,38%	

7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	92,00	95,11	14%	100%	103,38%	103,38%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							106,33%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	90,38%	14%	100%	106,33%	106,33%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,70%	
9	SDM yang Kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang Fit For Purpose							118,47%	
10a-N	Nilai review pengelolaan kinerja	P/M	76	96,4	14%	50%	126,84%	120,00%	hijau
10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	85	99,40	14%	50%	116,94%	116,94%	hijau
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							108,53%	
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	92,70%	14%	50%	97,07%	97,07%	kuning
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	273%	14%	50%	273,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								114,09%	hijau

Dari capaian kinerja terhadap 22 IKU Kemenkeu *Three* tahun 2022 tersebut, KPKNL Lhokseumawe melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* tahun 2022. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun, target addendum dan realisasi kinerja tahun 2022. Analisis tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. SASARAN STRATEGIS: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1). PNBPN BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara.
yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

2). PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3). PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. biaya permohonan lelang,
- d. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 3 IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagaimana berikut.

A. Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan kekayaan Negara dan Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K
Target	Rp684.000.000 (10%)	Rp2,052,000,000 (30%)	Rp2,052,000,000 (30%)	Rp4,104,000,000 (60%)	Rp4,104,000,000 (60%)	Rp6.840.000.000 (100%)	Rp6.840.000.000	Max/ TLK
Realisasi	Rp2.259.176.615	Rp3.118.818.830	Rp3.118.818.830	Rp4.577.138.923	Rp4.577.138.923			
Capaian	33,03%	45,6%	45,6%	66,92%	66,92%			

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi**Isu Utama:**

PNBP Pengelolaan Aset sebagian besar bergantung kepada hasil lelang barang rampasan satker Kejaksaan Negeri. Relaksasi nilai sewa BMN sesuai PMK 115/2020 secara tidak disadari justru menyebabkan turunnya realisasi PNBPN Pengelolaan Aset (PKN)

Implikasi:

Berpotensi tidak tercapainya target PNBPN Pengelolaan Aset. (PKN)

Isu Utama:

Terlaksana dengan baik (PN)

Implikasi:

PNBP PN yang dihasilkan sebesar Rp30.219.716,00 dari target Rp6.000.0000,00 (PN)

Isu Utama:

Belum terlaksana dengan baik. Implikasi

Implikasi:

Objek lelang berupa Barang Tidak Bergerak kurang markatable (banyak lelang TAP) (Lelang)

b) Akar Masalah

1. Penetapan target PNBPN Pengelolaan Aset tidak berdasarkan potensi riil dari portofolio BMN yg ada pada satker di wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, tetapi berdasarkan realisasi periode sebelumnya yg berasal dari hasil lelang barang rampasan Kejaksaan Negeri.
2. IKU PNBPN Pengelolaan Aset hanya menghitung nominal PNBPN yang dihasilkan, tidak memperhitungkan multiplier effect secara ekonomi dan sosial atas relaksasi nilai sewa BMN kepada mitra sewa yang memenuhi kriteria. (PKN)
3. Objek lelang berupa Barang Tidak Bergerak kurang markatable (Lelang)

c) Tindakan Yang Telah dilaksanakan

1. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan satuan kerja terkait penggalian potensi pemanfaatan asset dan tata caranya(pkn)
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN (pkn)
3. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan BMN yang belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang
4. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial untuk diikutsertakan dalam Crash Program (keringanan utang). (PN)
5. Melakukan sosialisasi kepada penyerah piutang melalui surat pos tercatat terkait PMK 11/PMK.06/2022. (PN)
6. Melaksanakan lelang sesuai ketentuan yang berlaku (Lelang)

d) Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan pemetaan terhadap aset BMN yang berpotensi untuk dimanfaatkan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja guna penggalian potensi pemanfaatan asset (pkn).
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dan DirektoratBMN (pkn).
4. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial (PN).
5. Melanjutkan pengurusan piutang negara ke tahap berikutnya. (PN)
6. Pelaksanaan kegiatan on the spot dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah yang akan dikunjungi dan dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan (PN)
7. Menghimbau para Pemohon lelang agar lebih meningkatkan permohonan lelang terutama yang mempunyaipotensi laku (Lelang).

B. Persentase Produktivitas Lelang**1) Deskripsi Kinerja**

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar

oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	Persentase Produktifitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	36%						36%	Max/ TLK
Realisasi	41,18							
Capaian	41,18							

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Telah terlaksana namun capaian akan ditingkatkan pada triwulan II.

b) Akar Masalah

c) Tindakan yang Dilaksanakan

Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Mengusahakan terlaksana seluruh lelang dalam bentuk lelang internet agar lebih ramai yang ikut.

C. Persentase Hasil Pokok Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	Rp35.000.000.000						Rp35.000.000.000	Max/ TLK
Realisasi	Rp6.335.870.839							
Capaian	17,12%							

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

- 1) banyaknya lelang TAP dan Batal sehingga menyebabkan target pokok lelang sulit tercapai.
- 2) Pandemi Covid-19 menurunkan daya beli masyarakat.
- 3) Sudah terlaksana dengan baik

Implikasi:

Tidak ada

b) Akar Masalah

Objek Lelang berupa Barang Tidak Bergerak kurang marketable (Banyak lelang TAP).

c) Tindakan yang Dilaksanakan

- 1) Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial untuk diikutsertakan dalam *Crash Program* (keringanan utang).
- 3) Melakukan sosialisasi kepada penyerah piutang melalui media *video conference* terkait PMK 15/PMK.06/2022 (Crash Program).

d) Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Menghimbau para Pemohon lelang agar lebih meningkatkan permohonan lelang terutama yang mempunyai potensi laku.

2. SASARAN STRATEGIS: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagaimana berikut:

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumaw	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	Rp35.000.000.000						Rp35.000.0	Max/ TLK
Realisasi	Rp6.335.870.839							
Capaian	17,12%							

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) **Isu Utama Dan Implikasi**

- 1) banyaknya lelang TAP dan Batal sehingga menyebabkan target pokok lelang sulit tercapai.
- 2) Pandemi Covid-19 menurunkan daya beli masyarakat.
- 3) Sudah terlaksana dengan baik

b) **Akar Masalah**

Objek Lelang berupa Barang Tidak Bergerak kurang marketable (Banyak lelang TAP).

c) **Tindakan yang Telah Dilaksanakan**

Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) **Rekomendasi Rencana Aksi**

Menghimbau para Pemohon lelang agar lebih meningkatkan permohonan lelang terutama yang mempunyai potensi laku.

b. Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara

1) Deskripsi Kinerja

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Penurunan outstanding piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	Rp350.000.000						Rp2.000.000.000	Max/ TLK
Realisasi	Rp329.069.153						Rp329.069.153	
Capaian	94,02%						94,02%	

a) Isu Utama dan Implikasi

Terlaksana dengan baik.

b) Akar Masalah

Tidak ada.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

- 1) Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial untuk diikutsertakan dalam *Crash Program* (keringanan utang).
- 2) Melakukan sosialisasi kepada penyerah piutang melalui surat pos tercatat terkait PMK 11/PMK.06/2022

d) Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial.
- 2) Melanjutkan pengurusan piutang negara ke tahap berikutnya.
- 3) Pelaksanaan kegiatan *on the spot* dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah yang akan dikunjungi dan dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan.

c. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara

- 1) Deskripsi Kinerja
- 2) Perbandingan Analisa Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	89						89	Max/ Averag e
Realisasi	N/A							
Capaian	N/A							

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

1) Isu Utama dan Implikasi

- a. Selalu ada potensi tidak terpenuhinya SOP penyelesaian waktu layanan kekayaan Negara. **Implikasi** : Menurunnya tingkat kepuasan layanan dari satuan kerja (PKN)
- b. 11 permohonan keringanan utang disetujui diantara 1-4 hari kerja (Telah dilaksanakan dengan baik) **(PN)**
- c. Tidak ada karena sudah tercapai **(Lelang)**
- d. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang, Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang, Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara), Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara), Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas, Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai telah diselesaikan tepat waktu. **(HI)**
- e. Capaian untuk Q1 belum dapat diakumulasikan karena terdapat beberapa data yang belum diakumulasi

2) Akar Masalah

- a. Kegiatan IKU lain yang harus segera direalisasikan, Keterbatasan SDM, Permohonan PSP, Pemindahtanganan, Pemanfaatan yang masuk secara bersamaan dalam jumlah banyak. (PKN)
- b. Terdapat 1 bea lelang batal yang belum disetorkan dikarenakan belum jelas pemohon dan debeturnya.

3) Tindakan yang telah dilaksanakan

- a. Dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (PN)
- b. Meningkatkan koordinasi dengan satker guna terpenuhinya kelengkapan berkas permohonan (pkn)
- c. Meningkatkan sinergi di internal seksi PKN dan antar seksi (pkn)
- d. Pelayanan Kebendaharaan Tepat Waktu, Koordinasi dengan Bank (HI)

d) Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Koordinasi dan saling sinergi dengan seksi piutang Negara, seksi lelang, dan para pejabat fungsional pelelang, serta bank (hi)
- 2) Meningkatkan internal control atas berkas permohonan yang masuk (pkn)
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan satker terkait kelengkapan berkas permohonan sebelum dikirimkan ke KPKNL (pkn)
- 4) Meningkatkan sinergi di internal seksi PKN dan antar seksi (pkn)
- 5) Melakukan pengawasan secara berkala terhadap permohonan layanan (pn)

3. SASARAN STRATEGIS: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan”.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 1 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

1) Deskripsi Kinerja

Kepuasan pengguna layanan DJKN yang tinggi tercermin dari tingginya nilai kepuasan dan harapan pengguna jasa atas seluruh layanan DJKN yang diberikan.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Birokrasi dari Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,50	Max/TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,70	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	104,44%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu utama dan implikasi

Tidak ada.

b) Akar Masalah

Tidak ada.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan pengawasan secara berkala oleh kepala seksi terhadap pelayanan.

4. SASARAN STRATEGIS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

“Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna”.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 4 IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagaimana berikut:

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**1) Deskripsi Kinerja**

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- a) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- b) pengurusan piutang negara; dan
- c) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- b) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating).
- c) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- d) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumaw	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	499						499	Min/ TLK
Realisasi	150							
Capaian	30,06%							

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Isu utama: Pandemi covid19 dan regulasi & kebijakan tentang layanan secara fisik yang dihentikan sejak tanggal 16 Maret 2020

Banyak ditemukan bangunan pada satker yang dibangun sebelum adanya ketentuan tentang SBSK.

BMN pada satuan kerja yang terletak di hampir setiap kecamatan dalam kabupaten.

Implikasi: Hasil Pengukuran tidak mencapai hasil yang maksimal Persentase Pengukuran Penggunaan BMN sesuai SBSK, dan berpotensi tidak tercapainya realisasi capaian kinerja. Pengukuran SBSK menjadi lebih sulit dikarenakan akses yang sulit dilalui dan membutuhkan banyak waktu untuk menuju BMN target.

b) Akar Masalah

Ruang kerja yang bersifat privacy menjadi kendala dalam teknis pelaksanaan pengukuran SBSK.

Bangunan pada satker yang dibangun sebelum adanya ketentuan SBSK cenderung lebih sulit untuk tercapainya target pengukuran SBSK.

Adanya BMN yang tidak dipergunakan karena alasan tertentu. Lokasi BMN yang terletak jauh di kecamatan dalam kabupaten.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan satker melalui media yang dianjurkan seperti telepon dan aplikasi WhatsApp.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN DJKN melalui media yang dianjurkan seperti telepon, aplikasi WhatsApp & Zoom.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan satker terkait persiapan pengukuran SBSK yang menjadi target.

b. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan

1) Deskripsi Kinerja

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- 2) pengurusan piutang negara; dan
- 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- b) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNB (revenue generating).
- c) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- d) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseuma	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	1.927						1.927	Max / TLK
Realisasi	2							
Capaian	0,10%							

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) **Isu Utama dan Implikasi****Isu utama:**

- a. Satker masih belum melengkapi berkas sertipikat tanah dan tanah BMN masih bermasalah/sengketa.
- b. Satker masih belum dapat melakukan pendampingan pengukuran di beberapa kantor pertanahan.

Implikasi:

- a. Pengukuran yang tertunda menjadikan proses penerbitan sertifikat menjadi terlambat pula.
- b. Penyerahan berkas dan tindak lanjutnya menjadi terhambat.

b) Akar Masalah

Satker penerima manfaat memiliki banyak target di beberapa kabupaten sehingga penjadwalan pengukuran menjadi terhambat dan terlambat.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, Kantor Pertanahan, Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN.
- 2) Melaksanaan hal-hal antisipatif untuk memitigasi risiko tidak tercapainya target sertifikasi BMN berupa tanah.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, Kantor Pertanahan, Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN.
- 2) Melaksanaan hal-hal antisipatif untuk memitigasi risiko tidak tercapainya target sertifikasi BMN berupa tanah.

c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

1) Deskripsi Kinerja

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- a) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- b) pengurusan piutang negara; dan
- c) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- b) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNB (revenue generating).
- c) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)

- d) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	35						35	Max/ TLK
Realisasi	3						3	
Capaian	8,57%						8,57%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Isu utama :

Realisasi sebesar 3 BKPN diperoleh dari :

Pelunasan = 3 BKPN (SPPNL).

Pengembalian = 0 BKPN (SKPPN).

Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih = 0 (PSBDT)

b) Akar Masalah

Sejak diserahkan dokumen barang jaminan sebagian besar tidak diketahui keberadaannya, tidak dikuasai oleh penyerah piutang, tidak dilakukan pengikatan, dan barang jaminan tidak marketable.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 1) Melakukan konfirmasi keberadaan barang jaminan kepada penyerah piutang.
- 2) Asset tracing dengan melakukan pencarian barang jaminan atau harta kekayaan lain ke pihak terkait.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Mengusahakan terlaksananya penyelesaian BKPN dengan melakukan penagihan dan pemeriksaan debitur di lapangan.
- 2) Optimalisasi barang jaminan yang berhasil diidentifikasi.
- 3) Penelitian lapangan untuk mengetahui keberadaan dan atau kemampuan penanggung hutang.

d. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**1) Deskripsi Kinerja**

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi:

- a) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND;
- b) pengurusan piutang negara; dan
- c) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle).
- b) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNB (revenue generating).
- c) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum).
- d) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	50							Max/ TLK
Realisasi	8							
Capaian	16%							

a) Isu Utama dan Implikasi

Telah dilaksanakan dengan baik.

b) Akar Masalah

Telah dilaksanakan dengan baik.

c) Tindakan Yang telah dilaksanakan

- 1) Melakukan pemetaan terhadap BMN target.

- 2) Melaksanakan koordinasi dengan satker melalui media yang dianjurkan seperti telepon dan WhatsApp.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN DJKN melalui media yang dianjurkan seperti telepon, aplikasi WhatsApp & Zoom.

d) Rekomendasi rencana Aksi

Sudah tercapai sehingga tidak perlu rencana aksi

5. SASARAN STRATEGIS: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 1 IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagaimana berikut:

Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasi nya adalah 0%

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penilaian yang Berkualitas							
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	19%							Min/ TLK
Realisasi	0%							
Capaian	120%							

a) Isu Utama dan Implikasi

Sejauh ini tidak ada permasalahan yang cukup berarti.

b) Akar Masalah

Tidak ada.

c) Tindakan yang telah dilaksanakan

Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Berkoordinasi dengan Kanwil dan Kantor Pusat DJKN.

6. SASARAN STRATEGIS: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

a. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

1) Deskripsi Kinerja

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya

pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

- a) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- b) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	92%						92%	Max/ TLK
Realisasi	100%							
Capaian	100%							

a) Isu Utama dan Implikasi

Seluruh pelaksanaan lelang telah dilaksanakan dalam bentuk lelang internet (E-Auction).

b) Akar Masalah

Tidak ada.

c) Tindakan yang telah dilaksanakan

Telah melaksanakan lelang dalam bentuk lelang internet (E-Auction).

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Mengusahakan terlaksana seluruh lelang dalam bentuk internet.

b. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

1) Deskripsi Kinerja

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

NBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN adalah 15%

Target Deviasi PNBPN dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	10						10%	Max/ Average
Realisasi	1,91							
Capaian	1,91							

a) Isu Utama dan Implikasi

- Telah dilaksanakan dengan baik. Penyetoran PNBPN Lelang telah dilakukan sesuai Rincian Uang Hasil Lelang. (lelang)
- Pencatatan pada FocusPN dan pembayaran dilakukan dengan teliti sehingga meminimalisir selisih. (hi)

b) Akar Masalah

Tidak ada.

c) Tindakan yang telah dilaksanakan

- Penyetoran PNBPN Lelang sesuai Rincian Uang Hasil Lelang. (HI)
- Pencatatan pada FocusPN dan pembayaran dilakukan dengan teliti sehingga meminimalisir selisih (HI).

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Tidak Ada karena sudah tercapai.

7. SASARAN STRATEGIS: Edukasi yang Efektif**Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi****1) Deskripsi Kinerja**

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas tingkat pemahaman, kualitas materi, kualitas fasilitator, dan kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta;
- kualitas materi (bobot 15%),
- kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu (Tersedia kuesioner Bimbingan Teknis secara Offline dan Online).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja**8. SASARAN STRATEGIS: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif****Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan****1) Deskripsi Kinerja**

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- Terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.
- Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN.
- Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumaw	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Aset							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	85%						85%	Max/ Avg
Realisasi	58,82%							
Capaian	69,2%							

a) Isu Utama dan Implikasi

Satuan Kerja yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan BMN namun tidak menindaklanjuti persetujuan dimaksud dikarenakan terdapat beberapa hal teknis lainnya.

b) Akar Masalah

Tidak ada.

c) Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Mendorong satuan kerja secara rutin untuk menindaklanjuti Persetujuan yang telah diterbitkan KPKNL Lhokseumawe.
- 2) Memberikan asistensi terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN.
- 3) Meminta bantuan kanwil DJKN untuk membantu mendorong Korwil Satker untuk segera menindaklanjuti persetujuan Pengelolaan BMN.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan percepatan tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset dengan berkoordinasi dengan satker.

9. SASARAN STRATEGIS: SDM Yang Kompeten**Persentase pengembangan kompetensi pegawai**

1) Deskripsi Kinerja

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	SDM yang Kompeten							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	100%						100%	Max/TLK
Realisasi	20,87%							
Capaian	120%							

a) Isu Utama dan Implikasi

minat para pegawai dalam mengikuti Diklat dikarenakan sampai dengan Triwulan I, pelaksanaan diklat masih dilaksanakan dengan Pelatihan Jarak Jauh. Pegawai tidak menginput pembelajaranku di Menu Pembelajaran pada Aplikasi *E-Performance*. Baik itu kompetensi klasikal ataupun non klasikal pada kegiatan DKI per Triwulan, atau ketidaksesuaian Kompetensi Klasikal dan Non Klasikal yang dipilih di Menu Pembelajaran saat kegiatan DKI.

b) Akar Masalah

- 1) Pelaksana dan Pejabat tidak mengambil diklat Klasikal atau Non Menu Pembelajaran saat kegiatan DKI.
- 2) Kurangnya minat Pelaksana dan Pejabat mengikuti diklat Klasikal dikarenakan disaat Pandemi COVID-19, diklat dilaksanakan secara *online*.

c) Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Memberikan informasi mengenai Kegiatan *Softcompetency* seperti *E-Learning* (*Open Access*) kepada seluruh Pegawai KPKNL Lhokseumawe.
- 2) Mengingatkan para pegawai di setiap awal bulannya dalam mengajukan diklat di Aplikasi Diklat.
- 3) Memantau kegiatan DKI untuk mengingatkan pegawai untuk menginput "pembelajaranku" di Menu Pembelajaran.
- 4) Target di Q1 telah tercapai sebesar 20.87%.

d) Rekomendasi rencana Aksi

- 1) Memberikan informasi mengenai Kegiatan *Softcompetency* seperti *E-Learning* (*Open Access*) kepada seluruh Pegawai agar 24 JP dapat tercapai.
- 2) Menginformasikan pengajuan diklat setiap bulannya pada Aplikasi Diklat.
- 3) Mengingatkan atasan dalam melakukan approval terhadap diklat pegawai pada Aplikasi Diklat DJKN.
- 4) Memantau kegiatan DKI untuk mengingatkan pegawai untuk menginput "pembelajaranku" di Menu Pembelajaran.

10. SASARAN STRATEGIS: Organisasi yang Fit For Purpose

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagaimana berikut:

a. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja

1) Deskripsi Kinerja

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
TOTAL		100%

b. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

1) Deskripsi Kinerja

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Organisasi yang Fit-For-Purpose							
	Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat administrator							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	85						85	Average/ TLK
Realisasi	100							
Capaian	100							

a) Isu Utama dan Implikasi

Tidak ada

b) Akar Masalah

Tidak ada

c) Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Melaksanakan kegiatan FGD melalui daring/online (zoom meeting) dengan tetap mengikuti protocol COVID-19.
- 2) Menginformasikan pelaksanaan FGD Kode Etik dengan tidak terburu-buru sehingga dapat diikuti oleh seluruh pegawai.

d) Rekomendasi rencana Aksi

Tidak ada karena sudah tercapai.

11. SASARAN STRATEGIS : Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagaimana berikut:

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

1) Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah

Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumaw	Pengelolaan keuangan yang optimal							
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	95,50%						95,5%	Max/ Avg
Realisasi	N/A							
Capaian	N/A							

a) Isu Utama dan Implikasi

- 1) Capaian pada Q1 belum dapat diperoleh diakibatkan Perhitungan ikpa terus berubah sepanjang tahun, tahun ini terdapat reformulasi ikpa, serta terdapat peraturan baru yang menimbulkan relaksasi ikpa.
- 2) Terdapat migrasi rekening virtual BPG dari BRI Syariah ke BSI pada akhir bulan yang menyebabkan rekening Vatempat penampungan UP operasional kantor yang lama tidak aktif pertanggal 27 Agustus disisi lain rekening VA baru BSI baru aktif pertanggal 6 September 2021 sehingga terdapat SPM yang tidak dapat direalisasikan pada akhir triwulan III.
- 3) Terdapat pula perubahan persentase penyerapan anggaran triwulan III yang semula 60% menjadi 70% sesuai dengan nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-292/PB/2021 tanggal 25 Agustus 2021 hal Akselerasi Belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

b) Akar Masalah

Akselerasi penyerapan anggaran dan Mergernya 3 (tiga) Bank Syariah.

c) Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Merealisasikan anggaran bulan Desember sesuai dengan RPD -Tetap melaksanakan dan menyampaikan dokumen/laporan yang berkaitan dengan IKPA OM-SPAN dalam rangka menjaga tata kelola keuangan.
- 2) Melakukan perhitungan IKU PKPA dengan berpedoman pada SE-8/MK.1/2020 sesuai format kertas kerja.
- 3) Menatausahakan dokumen pendukung perhitungan IKU PKPA -Menyampaikan laporan capaian IKU PKPA.

d) Rekomendaasi Rencana Aksi

Melaksanakan kewajiban pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan keuanganyang berkaitan dengan IKPA OM-SPAN dengan lebih efektif.

b. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

1) Deskripsi Kinerja

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN

Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari:

A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA),

Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan.

B. Persentase Validitas dan Completness Master Aset

Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain 1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); 2. foto; 3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); 4. batas dan GPS; 5. fasilitas; dan 6. konstruksi.

2. Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan

Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan berfokus pada dukungan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) merupakan Indeks yang diukur oleh LKPP yang terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan. Dalam mendukung capaian ITKP dengan target minimal baik di tahun 2023 maka diperlukan indikator dukungan ITKP yakni Persentase Dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu

paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan keuangan yang optimal							
	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	100%						100%	Max/ Avg
Realisasi	15%							
Capaian	15%							

a) Isu Utama dan Implikasi

Tidak ada

b) Akar Masalah

Tidak ada

c) Tindakan yang telah dilaksanakan

Melaksanakan pengelolaan BMN dan pengadaan dengan tepat.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Melaksanakan kewajiban pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan IKPA OM-SPAN dengan lebih efektif.

Tabel 3.4

Perbandingan % Capaian Capaian Kinerja 2021 dan 2022

Kode	IKU	Capaian 2022	Kode	IKU	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective(25%)	30,00%		Stakeholder Perspective(25%)	27,72%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	120,00%	1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	110,88%
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	120,00%	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	116,49%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	120,00%	1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	94,14%
	Customer Perspective(15%)	15,94%	1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	120,00%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	104,89%		Customer Perspective(15%)	16,47%
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	83,92%	2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	115,11%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	120,00%	2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	108,89%
2c-N	Indeks Rata-Rata Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	112,36%	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	120,00%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	107,69%	3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	104,44%
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	107,69%	3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	104,44%
	Internal Process Perspective (30%)	33,45%		Internal Process Perspective (30%)	32,50%

4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	113,41%	4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	106,88%
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	120,00%	4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	101,20%
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	111,47%	4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100,00%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	120,00%	4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	120,00%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100,00%	5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	117,17%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	120,00%	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	120,00%
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	120,00%	5b-CP	Persentase produktivitas lelang	120,00%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	114,35%	5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	108,70%
6a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	108,70%	5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	120,00%
6b-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	120,00%	6	Edukasi yang efektif	101,93%
7	Edukasi yang Efektif	103,38%	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	101,93%
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	103,38%	7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif	107,33%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	106,33%	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	107,33%
	Learning & Growth Perspective (30%)	34,70%		Learning & Growth Perspective (30%)	33,91%
9	SDM yang Kompeten	120,00%	8	SDM yang kompeten	120,00%
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120,00%	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	120,00%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	118,47%	9	Organisasi yang fit for purpose	120,00%

10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	116,94%	9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	120,00%
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	108,53%	9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	120,00%
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	97,07%	10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	99,11%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	120,00%	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	99,11%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		114,09%	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		110,60%

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2022, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022.

Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi SAKTI (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).

Realisasi Anggaran KPKNL Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Barang	1.976.224.000,00	1.930.841.295,00	97,70%
Belanja Modal	0,00	0,00	0%
Belanja Pegawai	0	0	0%
Total	1.976.224.000,00	1.930.841.295,00	97,70

Persentase penyerapan anggaran di KPKNL Lhokseumawe pada tahun 2022 adalah sebesar 97,70. sebesar Rp 1.930.841.295,00. Pada halaman selanjutnya terdapat Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Lhokseumawe dari Tahun 2021 s.d. 2022. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 s.d. 2022 persentase realisasi penyerapan anggaran mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan jumlah pegawai, penyerapan perjalanan dinas, penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal secara maksimal.

Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Lhokseumawe dari Tahun 2021 s.d. 2022

	2021			2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	1.780.768.000,00	1.763.972.399,00	99,06	1.976.224.000,00	1.930.841.295,00	99.07
Belanja Modal	29.550.000,00	29.550.000,00	100	0	0	100
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0
Total	1.810.318.000,00	1.793.552.399,00	99,07	1.976.224.000,00	1.930.841.295,00	99,07

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Lhokseumawe tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Lhokseumawe dalam tahun anggaran 2022 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPKNL Lhokseumawe merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan Negara, piutang negara dan lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Lhokseumawe mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

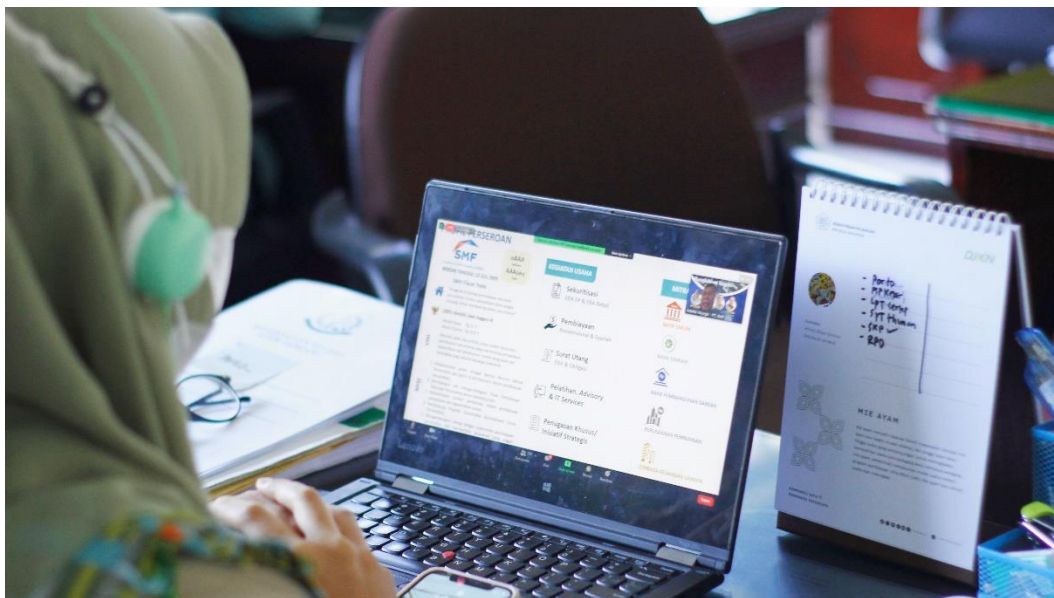
Akhir kata, dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi sehingga tercipta akuntabilitas yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan khususnya oleh Pimpinan Kantor Wilayah DJKN Aceh dan Kantor Pusat DJKN. Diharapkan dapat diterima umpan balik yang baik guna peningkatan kinerja sebagai bahan pengambilan kebijakan di masa mendatang.

LAMPIRAN

Kaleidoskop Tahun 2022

Januari

Januari 2022 dimulai dengan banyak aktivitas, salah satunya Forum Sanger Kemenkeu yang mengambil tema “Bersama SMF Bangkitkan Negeri”. Forum ini diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkeu Satu Aceh, mengupas tuntas pembiayaan sekunder perumahan dan kontribusi PT Sarana Multigriya Finansial Persero sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara di bawah binaan dan pengawasan Menteri Keuangan.



Februari

Pada Februari 2022, KPKNL Lhokseumawe mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kekayaan Negara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon, Aceh Tengah. Diikuti oleh seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, Kepala KPKNL Lhokseumawe, Bono Yudianto menyampaikan siklus Pengelolaan Kekayaan Negara yang baik, salah satunya pentingnya pengukuran Standar Barang Standar Kebutuhan karena berkaitan dengan efisiensi anggaran belanja dan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN).



Maret

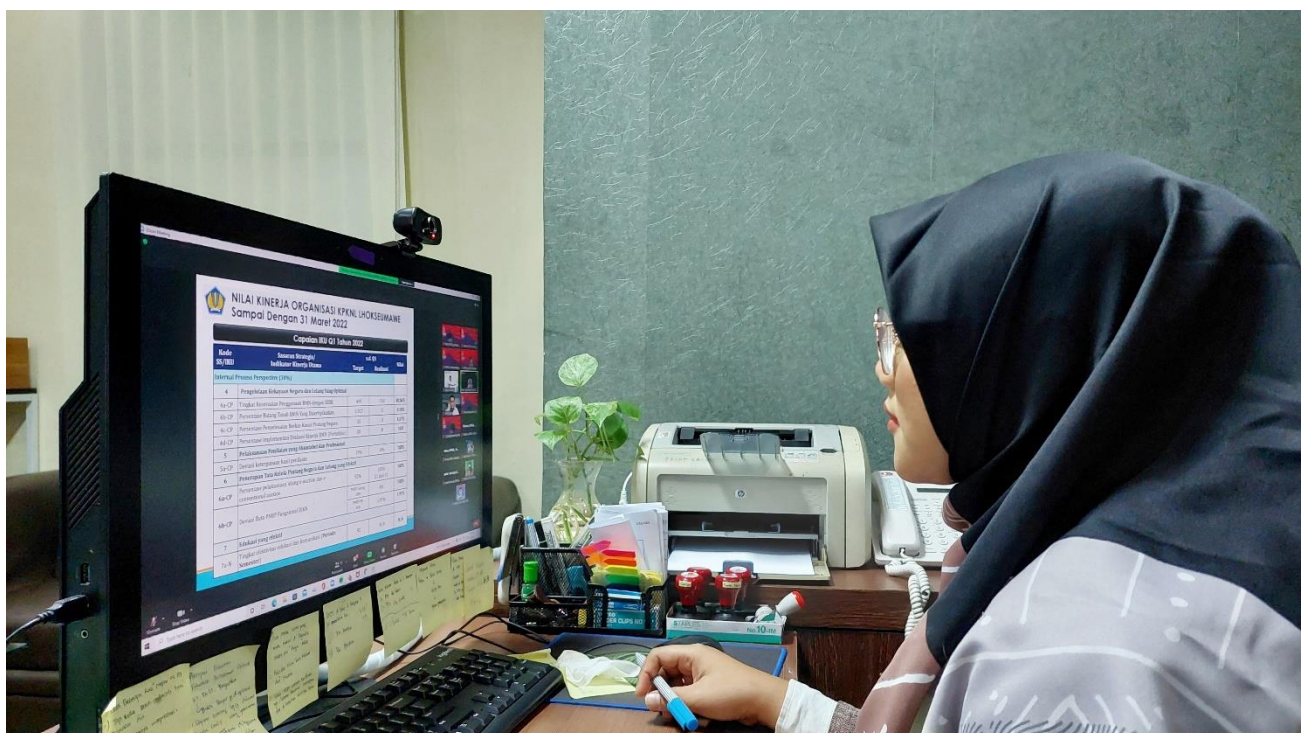
Maret 2022, Kantor Wilayah DJKN Aceh bersama dengan KPKNL Lhokseumawe mengadakan kegiatan Lantera KN, Layanan Terpadu Kekayaan Negara di Kota Langsa. Kegiatan kolaborasi tersebut dilaksanakan untuk mendekatkan layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh, sekaligus menjadi wadah sosialisasi terkait tugas dan fungsi kantor vertikal DJKN di wilayah Aceh.



April

Pada bulan April 2020, KPKNL Lhokseumawe kembali mengadakan agenda rutin berupa Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Triwulan I Tahun 2022. Forum tersebut merupakan praktik manajemen yang mempertemukan atasan dan bawahan langsung, dan dilaksanakan secara teratur dan terencana. Di dalam forum tersebut, seluruh peserta menggunakan data capaian kinerja untuk melakukan pemantauan kinerja setiap unit di KPKNL Lhokseumawe.

Di bulan yang sama, KPKNL Lhokseumawe juga melakukan sosialisasi Program Keringanan Utang yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Lhokseumawe. Ade Irawan selaku Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Lhokseumawe menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah memberikan keringanan utang dalam bentuk pengurangan pokok utang, bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya.



Mei

Pada Mei 2022, KPKNL Lhokseumawe melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur terkait penuntasan serta penyelesaian target Sertipikasi Barang Milik Negara berupa tanah di Kabupaten Aceh Timur. Melalui pertemuan tersebut, KPKNL Lhokseumawe dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur berkomitmen untuk menyelesaikan target sertipikasi di wilayah Aceh Timur pada tahun 2022.

Di bulan Mei juga seluruh jajaran KPKNL Lhokseumawe merayakan bulan Ramadhan, bulan yang penuh kemenangan. Pandemi Covid-19 tidak menjadi halangan untuk memperbanyak ibadah dan berbuat kebaikan kepada manusia dan alam. Ramadhan dilalui dengan penuh semangat dan Khidmat, hingga besok hari kemenangan tiba dan suara gemuruh takbir terdengar. Taqabballahu Minna Wa Minkum



Juni

Juni 2022. KPKNL Lhokseumawe melakukan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan Barang Milik Negara dengan Standar Barang Standar Kebutuhan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa. Pengukuran tersebut dilaksanakan untuk menunjukkan kontribusi Barang Milik Negara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui tertib Kelola melalui penggunaan Barang Milik Negara sesuai dengan tujuan pengadaannya.

Selain itu, di bulan Juni KPKNL Lhokseumawe bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe bersinergi dalam mendukung bangkitnya UMKM di Lhokseumawe. KPKNL Lhokseumawe berpartisipasi dalam kegiatan “Festival Meurah Silu-KKAG Tahun 2022” yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe. Dalam acara yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi dan kebudayaan daerah pesisir laut dan pegunungan tersebut, KPKNL Lhokseumawe menawarkan layanan lelang bagi seluruh pelaku UMKM untuk memperluas jalur distribusi produk UMKM.



Juli

Dalam rangka sinergi antar instansi Kementerian Keuangan sesuai budaya Kemenkeu SATU (Sinergi, Adaptif, berTeknologi, Unggul) dilaksanakan Press Release APBN Semester I Tahun 2022 pada tanggal 13 Juli 2022 bertempat di Aula KPPN Lhokseumawe. Kegiatan Press Release ini dihadiri oleh KPPN Lhokseumawe, KPKNL Lhokseumawe, KPP Pratama Lhokseumawe, KPP Pratama Bireun serta KPPBC Lhokseumawe dan juga dihadiri oleh Pemda Lhokseumawe serta Pemda Bireun, BPS Kota Lhokseumawe serta perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.



Agustus

Pada bulan Agustus, KPKNL Lhokseumawe melaksanakan DJKN Goes to School di MAN 1 Lhokseumawe. Dengan kegiatan-kegiatan interaktif, seluruh pembicara memperkenalkan DJKN kepada siswa-siswi, hingga ditutup dengan simulasi lelang yang dibawa langsung oleh Pejabat Pelelang di KPKNL Lhokseumawe.

Di bulan yang sama pula KPKNL Lhokseumawe bersama jajaran Kanwil DJKN Aceh menyambangi Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan Kedai Lelang UMKM “Lelang Kopi di Kebun Kopi”. Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan peresmian Kabupaten Bener Meriah sebagai Kabupaten Binaan kanwil DJKN Aceh, sebuah program unggulan Kanwil DJKN Aceh bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam bentuk Coaching Program for New Exporter (CPNE) bagi UMKM berorientasi ekspor di Kabupaten Bener Meriah.

Di bulan Agustus juga KPKNL Lhokseumawe berserta seluruh pegawai Kementerian Keuangan Satu Lhokseumawe mengikuti Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dipimpin oleh Kepala KPPN Lhokseumawe, Febri Marihot Simbolon, upacara berlangsung tertib dan hikmat.



September

September 2022, KPKNL Lhokseumawe bersama Bareskrim Polri, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Aceh, dan aparaturnya melakukan pemasangan plang aset property eks Bank Dalam Likuidasi di Kota Lhokseumawe. Pemasangan plang pada lima titik tersebut merupakan bentuk penguasaan fisik aset, dilakukan sebagai upaya pengamanan aset dan menjamin kepastian hukum bahwa aset tersebut merupakan kekayaan negara.

Pada bulan yang sama juga jajaran Kemenkeu Satu Lhokseumawe mengadakan kegiatan senam bersama, sekaligus sebagai pembukaan Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia. Kegiatan senam tersebut dilanjutkan dengan pertandingan olahraga antar seluruh pegawai di Kemenkeu Satu Lhokseumawe.



Oktober

Pada bulan Oktober 2022, KPKNL Lhokseumawe mengikuti Upacara Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke 76 di lapangan Gedung Keuangan Negara (GKN) Aceh. Upacara yang dihadiri oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan Satu Aceh tersebut mengambil tema “Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan.

KPKNL Lhokseumawe beserta jajaran Kemenkeu Satu Lhokseumawe juga mengadakan kuliah umum bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Kuliah Umum tersebut mengusung tema “Manajemen Keuangan Negara: Kemenkeu Lhokseumawe Goes to Campus Unimal”.



November

Pada bulan November, KPKNL Lhokseumawe kembali mengadakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022. Upacara yang dilaksanakan di Aula KPKNL Lhokseumawe tersebut berlangsung tertib dan diikuti oleh seluruh jajaran KPKNL Lhokseumawe.

KPKNL Lhokseumawe juga turut berpartisipasi dalam rangkaian penutupan dari Hari Oeang Republik Indonesia. Rangkaian acara tersebut ditutup dengan kegiatan Jalan Santai HORI dan UMKM Food Festival yang berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe.



Desember

Di penghujung tahun 2022, KPKNL Lhokseumawe bersama Kemenkeu Satu Aceh menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero dalam melaksanakan Sosialisasi dan Sharing Session bertemakan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Bupati dan Walikota, serta instansi-instansi terkait yang ada di Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan insight bagi Pemerintah Daerah agar pada tahun mendatang, ada pembangunan infrastruktur baru di Aceh yang menggunakan skema pembiayaan KPDBU atau KPBU.

